

**PENGARUH AKUNTABILITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

**Dian Lestari Siregar**

Dosen Universitas Putera Batam

diansir89@gmail.com

**ABSTRACT**

*Tax is one of the main sources of revenue of the state, where the tax revenue is utilized for national and regional development. The government continues to increase revenues from the tax sector and one of them is revenue from the local tax sector. One source of local tax revenue is the Motor Vehicle Tax (PKB). Batam City which is an industrial city becomes its own magnet for the population of productive age especially residents outside the city of Batam, which causes the increase in number of residents of Batam from year to year. The increase in population has an effect on the number of motor vehicle demand to facilitate economic activity, plus the number of credit offer from various trade associations, so that the number of motor vehicles in Batam continues to increase, the final impact is the acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB). Acceptance Batam City PKB has increased significantly, but the achievement is not accordance with the targeted by the government of 100 percent. Achievement is only 50-52 percent, which means the government efforts are not optimal. The lack of optimization is one of the caused why the compliance of taxpayers of motor vehicle is low. The aim of this study is to see the impact of Service Accountabilit and Sanctions to taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Batam. This research uses quantitative descriptive method with sampling technique using purposive sampling and than calculated with slovin formula. The number of samples obtained by 100 respondents. Data analysis using multiple linear regression analysis. The results showed that accountability of public services has no significant effect on taxpayer compliance. While tax sanction have a positive and significant impact on taxpayer compliance.*

**Keywords: Service Accountability, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance**

**PENDAHULUAN**

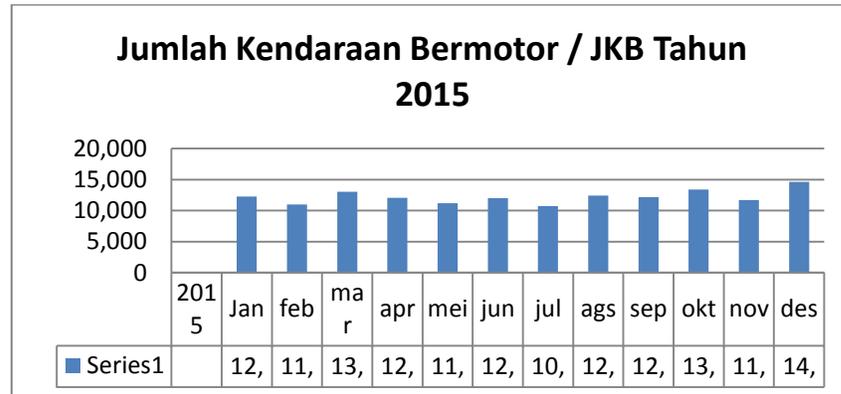
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber penerimaan utama, pajak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan nasional dan daerah, membiayai *public investment*, membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Maka pemerintah harus terus berupaya meningkatkan target penerimaan dari sektor pajakan guna terwujudnya pemerataan pembangunan.

Secara efektif, pemerintah pusat tidak mungkin dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, maka disentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan yang ada di daerah sangat dibutuhkan. Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah pusat tersebut, maka sebagian unsur-unsur tersebut di serahkan kepada daerah, yakni pemerintah daerah. Baik itu yang menyangkut kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan maupun pembiayaan. Namun semua itu tidak lepas dari daripada tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016).

Pajak daerah telah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan salah satu jenis pendapatan pajak daerah salah satunya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Ilhamsyah et al., 2016).

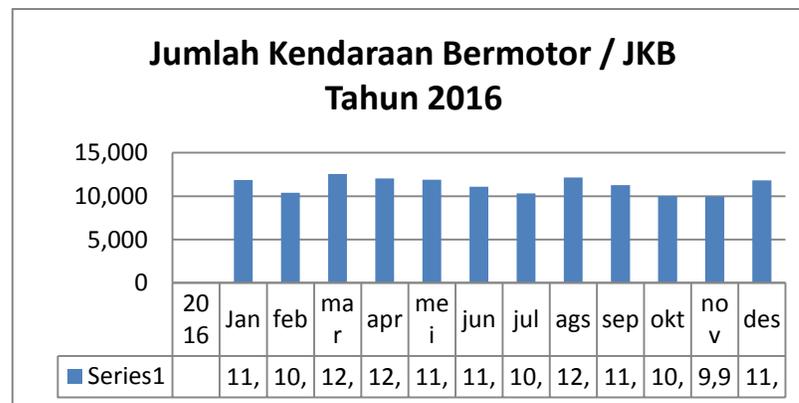
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dana tau penguasaan kendaraan bermotor (Ariska, 2015). Bagi kota Batam sendiri, besarnya penerimaan PKB tentu dipengaruhi oleh besarnya Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB).



**Gambar 1.1** Jumlah Kendaraan Bermotor / JKB Kota Batam Tahun 2015

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Gambar 1.1 diatas menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di kota Batam pada tahun 2015, dari setiap bulan jumlahnya berfluktuasi menuju peningkatan dan rata-rata besarnya mencapai 12.000 kendaraan bermotor.

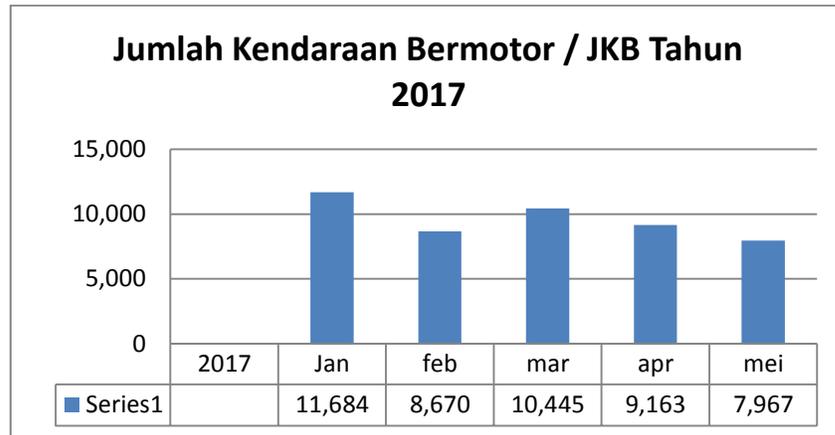


**Gambar 1.2** Jumlah Kendaraan Bermotor / JKB Kota Batam Tahun 2016

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Dari gambar 1.2 diatas menunjukkan, jumlah kendaraan bermotor di kota Batam pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di tahun 2015 rata-rata jumlah kendaraan bermotor mencapai 12.000, ditahun 2016 hanya sebesar 11.000 kendaraan bermotor.



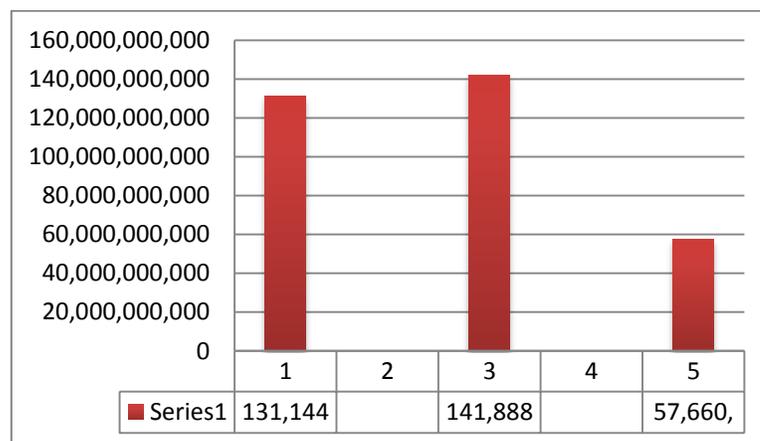
**Gambar 1.3** Jumlah Kendaraan Bermotor / JKB Kota Batam Tahun 2017

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Begitupun untuk tahun 2017, pada gambar 1.3 diatas menunjukkan Jumlah Kendaraan Bermotor dari bulan Januari sampai bulan Mei. Apabila dibandingkan dengan bulan Januari – Mei pada tahun 2016, ditahun 2017 ini pun jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada bulan Mei tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor mencapai 11.000, namun bulan Mei tahun 2017 hanya sebesar 7.000 kendaraan bermotor.

Meskipun jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terus mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan penduduk kota Batam tahun 2016 yang mencapai 1.030.529 jiwa. Jumlah pengguna kendaraan bermotor tersebut bisa dikatakan cukup besar. Besarnya jumlah pengguna kendaraan bermotor tersebut dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk kota Batam yang terus meningkat. Dan penambahan jumlah penduduk tersebut, tentu akan menambah penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak. Setiap kegiatan dan aktifitas ekonomi masyarakat kota Batam rata-rata membutuhkan bantuan sarana transportasi yang

mendukung seperti kendaraan bermotor. Selain transportasi ini dinilai lebih murah dan mempercepat mobilisasi aktivitas ekonomi, bertambahnya pengguna kendaraan bermotor juga karena semakin banyak tawaran kemudahan kredit dari suatu persekutuan dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor yang mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Maka hal tersebut tentu akan berpengaruh pada penerimaan pajak yang lebih besar pada kas daerah khususnya kota Batam (Rohemah, Kompyurini, & Rahmawati, 2013).



**Gambar 1.4** Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Batam tahun 2015-2017

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Gambar 1.4 diatas menunjukkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor kota Batam dari tahun 2015 hingga Mei 2017. Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup baik, dan hingga Desember tahun 2017 pun diperkirakan akan terus mengalami perolehan yang meningkat. Namun meski penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kas negara mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah tahun 2016 sebesar Rp. 223 miliar, tentu pencapaian yang telah diusahakan tersebut belum mencapai 100 persen justru hanya mampu mencapai 50 - 52 persen saja.

Dari hasil perolehan tersebut menunjukkan bahwa upaya yang telah dijalankan pemerintah berlangsung masih kurang optimal. Ketidak optimalan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan daerah kota Batam tersebut, harus didukung oleh akuntabilitas pelayanan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pengaruh akuntabilitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di kota Batam, tepatnya di kantor SAMSAT Jl. Engku Putri No.8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di kota Batam. Sampel diambil dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* lalu dihitung dengan rumus slovin:

$$\mathbf{n} = \frac{N}{1+Ne^2}$$

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan. Dalam sampel ini adalah 10%.

Data dari badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 tercatat sebanyak 11.000 kendaraan bermotor. Maka dari itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{11.000}{1+11.000 (10\%)^2}$$

$$n = 99,99$$

Dengan demikian, setelah dibulatkan maka penelitian ini menggunakan 100 orang pengguna kendaraan bermotor yang terdaftar dikantor SAMSAT kota Batam.

### Variabel Penelitian

**Tabel** Variabel penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas pelayanan (X1) (Nagawa, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Responsiveness</i></li> <li>2. <i>Responsibility</i></li> <li>3. <i>Accountability</i></li> </ol>	Likert
Sanksi pajak (X2) (Pertiwi, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi yang diberikan kepada WP harus jelas dan tegas</li> <li>2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi/tidak ada negoisasi</li> <li>3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang</li> <li>4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera</li> </ol>	Likert
Kepatuhan wajib pajak (Y) (Pertiwi, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek ketepatan waktu</li> <li>2. Aspek <i>Income</i> atau penghasilan wajib pajak</li> <li>3. Aspek <i>law enforcement</i> (peneraan sanksi)</li> <li>4. Aspek kewajiban pembukuan dan aspek pembayaran</li> </ol>	Likert

### Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda, dimana model penelitiannya ditunjukkan seperti persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

X<sub>1</sub> = Akuntabilitas pelayanan

X<sub>2</sub> = Sanksi pajak

e = *error*

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yang dianalisis dari hasil pengolahan data sesuai dengan model analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data berupa angka untuk menghitung dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT kota Batam. Dan untuk menganalisis data penelitian agar menjadi penelitian yang bersifat BLUE penelitian ini mengikuti tahapan dari:

1. Uji validitas data
2. Uji reliabilitas data
3. Uji analisis regresi linier berganda
4. Uji F statistik yang akan dibandingkan dengan F tabel
5. Uji t statistic yang akan dibandingkan dengan t tabel, dan
6. Uji koefisien determinasi

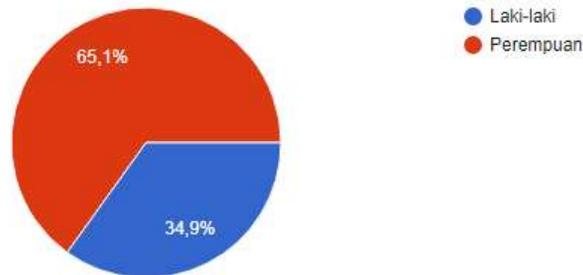
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis dan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner di kota batam maka didapatkan hasil sebagai berikut :

#### **Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Responden yang ada dalam penelitian ini terdiri atas laki-laki dan perempuan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

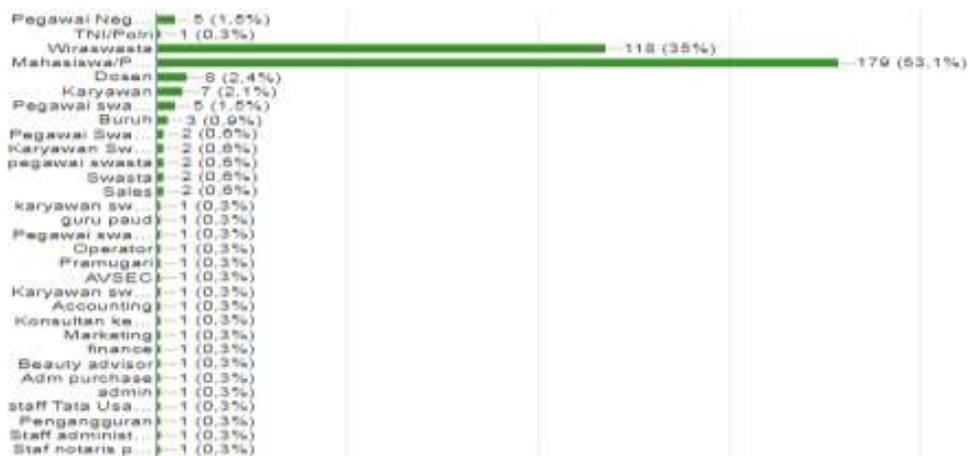


**Gambar** Diagram Pie responden berdasarkan Jenis kelamin

Dari 100 responden yang digunakan dalam penelitian 65.1% responden berjenis kelamin laki-laki dan 34.9% responden diketahui berjenis kelamin perempuan.

### Demografi responden berdasarkan pekerjaan

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dari Gambar berikut:



**Gambar** Diagram Batang responden berdasarkan pekerjaan

Dari 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini 35% responden diketahui bekerja Sebagai wiraswasta, 53.1% responden sebagai mahasiswa, 2.4% Responden bekerja sebagai dosen.

### Analisis Deskriptif

Dengan menggunakan program SPSS yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebaikan model dan pengaruh dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Diperoleh:

**Tabel Descriptive Statistic**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	99	4.00	20.00	15.5152	2.53693
AP	99	9.00	30.00	24.7374	3.43031
SP	99	5.00	25.00	18.8788	3.09137
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2018

Berdasarkan tabel diatas terdapat tiga variabel dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 100 sampel. Dengan nilai minimum sebagai nilai terendah untuk setiap variabel, dan nilai maksimum untuk nilai tertinggi untuk setiap variabel dalam penelitian. Dalam tabel juga dapat dilihat mean dari setiap nilai dari masing-masing variabel. Selain itu juga dapat dilihat standar deviasi nilai dari data masing-masing variabel.

### Hasil Uji Kualitas Data

#### Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dengan uji 2 sisi, maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,195.

**Table hasil uji Validitas**

No item	R tabel	Rxy	Keterangan
1	0.195	.439**	Valid
2	0.195	.199*	Valid
3	0.195	.472**	Valid
4	0.195	.474**	Valid
5	0.195	.242*	Valid
6	0.195	.334**	Valid
7	0.195	.348**	Valid

8	0.195	.459**	Valid
9	0.195	.504**	Valid
10	0.195	.769**	Valid
11	0.195	.868**	Valid
12	0.195	.871**	Valid
13	0.195	.768**	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2018

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan nilai r-hitung lebih besar dari pada nilai r-tabel. Maka disimpulkan bahwa seluruh instrument dalam penelitian dinyatakan valid.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas akan dilakukan dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

**Tabel Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.16235569
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.046
Kolmogorov-Smirnov Z		.834
Asymp. Sig. (2-tailed)		.490

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Olah data SPSS, 2018

Dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,490. dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6.296	1.622		3.881	.000		
1 AP	.158	.098	.213	1.614	.110	.433	2.312
SP	.281	.109	.343	2.593	.011	.433	2.312

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Olah data SPSS, 2018

Dari output diatas nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Sehingga dipastikan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

## Uji Autokorelasi

**Tabel Uji Autokorelasi**

Model	Model Summary <sup>b</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.523 <sup>a</sup>	.273	.258	2.18476	2.431

a. Predictors: (Constant), SP, AP

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Olah data SPSS, 2018

Dari hasil pengujian diatas, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2.431 nilai tersebut lebih besar dari nilai DU 1.7152 maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Nilai DW juga bisa dibandingkan dengan alpha 5%, dimana nilai DW lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi.

## Hasil Uji Pengaruh

### Analisis Estimasi dan Hasil Perhitungan Model Regresi Linier Berganda

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + e$$

**Tabel Hasil Estimasi****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.296	1.622		3.881	.000
1 AP	.158	.098	.213	1.614	.110
SP	.281	.109	.343	2.593	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Olah data SPSS, 2018

Dimana penjelasan setiap variabel adalah sebagai berikut:

- Nilai koefisien konstanta adalah sebesar 6.296 yang berarti, apabila akuntabilitas pelayanan public dan sanksi pajak nilainya nol atau konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 6.296.
- Nilai koefisien variabel akuntabilitas pelayanan adalah sebesar 0.158 yang berarti, apabila akuntabilitas pelayanan meningkat sebesar 1 persen maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 15.8 persen.
- Nilai koefisien variabel sanksi pajak adalah sebesar 0.281 yang berarti, apabila sanksi pajak meningkat sebesar 1 persen maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 28.1 persen

## Analisis Statistik

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dengan SPSS dijabarkan pada tabel dibawah ini.

**Table Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.523 <sup>a</sup>	.273	.258	2.18476

a. Predictors: (Constant), SP, AP

Sumber: Olah data SPSS, 2018

Nilai R<sup>2</sup> dari model diatas adalah sebesar 0.273. Hal ini menunjukkan bahwa variable-variabel independen pada model ini mampu menjelaskan atau dapat

mempengaruhi variabel dependennya sebesar 27.3. Sedangkan sisanya 72.7 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model dan tidak dimasukkan kedalam persamaan diatas.

### Uji t-statistik

**Tabel Hasil pengujian t-statistik model regresi**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.296	1.622		3.881	.000
1 AP	.158	.098	.213	1.614	.110
SP	.281	.109	.343	2.593	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2018

Dari hasil uji t statistik yang telah dilakukan, pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat satu variabel independen yang signifikan yakni sanksi pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.011 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  5% atau 0.05 persen. Sedangkan variabel akuntabilitas pelayanan tidak signifikan karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.110 lebih besar dari  $\alpha$  5% atau 0.05 persen.

### Uji F statistik

**Tabel Hasil pengujian F- statistik**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	172.501	2	86.250	18.070	.000 <sup>b</sup>
	Residual	458.227	96	4.773		
	Total	630.727	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), SP, AP

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2018

Dari hasil estimasi model regresi diatas diperoleh F-statistik yaitu 18.070 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari  $\alpha$  5% atau 0.05 persen maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebasnya pada tingkat kepercayaan 99%.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh akuntabilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil t hitung menunjukkan sebesar 0.110 lebih besar dari  $\alpha$  5% atau 0.05 persen.

Untuk melihat akuntabilitas pelayanan yg diberikan oleh SAMSAT Batam dapat dilihat dari beberapa indikator seperti ketelitian petugas dalam melayani masyarakat baik dalam hal proses pemberkasan dan administrasi, proses ini sebenarnya sudah dipermudah dengan layanan secara *online* yang bisa mempermudah masyarakat mengakses pajak kendaraan bermotornya, namun bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor masih banyak yang belum mengetahui informasi tersebut dan beberapa yang berasal dari daerah pulau masih banyak yang tidak melek teknologi sehingga proses tersebut dianggap malah lebih sulit dari pada melapor langsung ke kantor SAMSAT. Tersebar nya tempat-tempat pelayanan pembayaran pajak diberbagai lokasi tertentu juga ternyata tidak mempermudah masyarakat melaporkan pajaknya, hal tersebut dikarenakan masih ada masyarakat yang menganggap birokrasinya masih berbelit-belit seperti kendaraan tersebut merupakan kendaraan tangan ke-dua atau pemilik kedua sehingga proses pembayaran pajakpun lebih rumit karna harus mengurus proses balik nama dan lain-lain. Hal tersebut dampaknya pada pengumpulan pajak yang semakin sulit.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil t hitung menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.011 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  5% atau 0.05 persen.

Saksi merupakan alat pencegah agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai patuh

terhadap saksi tegas yang diberikan. Seperti Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, penerapannyapun sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Samsat pun mulai aktif melakukan razia sehingga banyak dari masyarakat yang sudah menunggak pajak diharuskan melaporkan dan membayar pajaknya pada saat terjaring razia tersebut. Sehingga pengguna kendaraan bermotor secara tidak langsung didorong untuk patuh dan taat melaporkan kewajibannya.

### **Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh akuntabilitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa ke dua variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil  $f$  hitung menunjukkan sebesar 18.070 dan nilai probabilitas sebesar 0.000. Nilai probabilitas  $f$  hitung tersebut lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05 persen.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil analisis data dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil pengujian pengaruh akuntabilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil  $t$  hitung menunjukkan nilai sebesar 0.110 lebih besar dari  $\alpha$  5% atau 0.05 persen.
2. Hasil pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil  $t$  hitung menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.011 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  5% atau 0.05 persen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, E. Y. (2015). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–143.
- Ilhamsyah, R., Endang, M., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8, 1–9. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (2nd ed.). Yogyakarta: Andi publisher.
- Nagawa, K. (2017). Akuntabilitas Publik (Public Accountability) Sebagai Pilar Good Governance.
- Pertiwi, A. (2013). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees). *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, 661–677.
- Rahayu, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1–14.
- Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2013). Analisis pengaruh implementasi layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kabupaten pamekasan. *Jurnal Infestasi*, 9(2), 137–146.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 345–357.
- Ummah, M. (2013). Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro*, 1–14.
- Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.